



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PEMBINAAN KEARSIPAN
SUB UNIT KERJA : DIREKTORAT KEARSIPAN PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AZMI
2. Jabatan : DIREKTUR KEARSIPAN PUSAT
3. NHK : 138387

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.031.000.000

1. Tanah Seluas 300 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 231.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/36 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/45 m2 di KOTA DEPOK , WARISAN Rp. 650.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 174 m2/36 m2 di KOTA DEPOK , WARISAN Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 255.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, TOYOTA SIENTA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 621.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---



Sub Total	Rp.	2.907.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.907.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Juni 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.